

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Bahder John Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2016, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Edy Ruchyat, 2007, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan ke-1, Nusa dan Nuansa, Bandung.
- Hasan Wargakusumah, 1995, *Hukum Agraria I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Idrus Hamkimi DT. Rajo Pangulu, 2004, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A. Dt. Rajo Mangkuto, 2010, *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar (Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya)*, Taushia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- K. Bertens, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat)*, Andalas University Press, Padang.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Rajab, 1969, *Sistem Kekerabatan Minangkabau*, Center Of Minangkabau Studies.
- Mochtar Naim, 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press, Padang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Putu Oka Ngakan, 2005, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri*, Center For international Forestry Research, Bogor.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono-Abdurrahman, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.

Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisus, Cetakan ke-14, Yogyakarta.

Tampil Anshari Siregar, 2011, *Undang Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.

Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (PMATR/BPN) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (PMATR/BPN) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

C. KARYA ILMIAH, MAKALAH, JURNAL DAN WAWANCARA

Materi Pembekalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sumatera Barat Tahun 2017

Syafruddin Kalo, (...) *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Zefrizal Nurdin, 2015, *Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma Dan Implementasi*, Jurnal Media Hukum, Vol. 22 No. 1

Wawancara dengan Nasrul, Selaku Bagian Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Solok.

Wawancara dengan Das Endaliwati, Selaku Pemegang Hak Atas Tanah Ulayat Kaum / Perwakilan kaum.

D. WEBSITE

<http://www.kabaranah.com/2014/11/wilayah-daerah-rantau-minangkabau.html>

<http://www.antarasumbar.com/berita/133127/sejarah-kota-solok--dari-sebuah-nagari-menjadi-kota-maju-dan-modern.html>

